



Yogya Gagas Rumah Layanan Disabilitas



MERAPI: TRI DARMAYATI

Penyandang tuna rungu menyimak juru bahasa isyarat saat workshop perlindungan hak-hak bagi disabilitas di Balaikota Yogyakarta.

UMBULHARJO (MERA-PI) - Keberadaan rumah layanan disabilitas diwacanakan di Kota Yogyakarta untuk memudahkan pelayanan secara terpadu. Mengingat selama ini pelayanan kepada penyandang disabilitas masih terpisah-pisah pelaksanaannya. "Kami, Bappeda dan komite disabilitas tengah melakukan telaah terkait rumah layanan disabilitas. Harapannya bisa terlaksana wacana rumah layanan disabilitas," kata Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Tri Maryatun, usai workshop perlindungan disabilitas di Balaikota, Kamis (4/4).

Dia menuturkan rumah layanan disabilitas berawal dari usulan tiga komunitas penyandang disabilitas di wilayah Bairo, Kraton dan Cokrodingratan. Tapi masih ada sedikit perbedaan pendapat terkait konsep rumah layanan disabilitas itu sehingga wacana ini masih ditelaah. Perbedaan pendapat itu pada pelayanan yang dapat diakses di Rumah Layanan Disabilitas saat diluncurkan. "Ada yang menghendaki bisa diawali dengan tempat dan pelayanan sederhana. Tapi ada juga yang ingin pelayanan sudah lengkap dengan fasilitas pendukung gedung permanen," terang Atun yang juga Sekretaris Komite Disabilitas Kota Yogyakarta.

Dia menyatakan selama ini Kota Yogyakarta sudah memiliki unit layanan disabilitas untuk anak berkebutuhan khusus pada aspek pendidikan di SDN Pujokusuman. Dia juga mengaku dalam Undang-Undang disabilitas maupun Perda disabilitas mengamanatkan adanya unit layanan khusus bagi disabilitas. "Selama ini pelayanan dari OPD terkait masih sendiri-sendiri. Dengan rumah layanan disabilitas ada layanan terpadu seperti kesehatan, pendidikan sampai rehabilitasi sosial dengan pelatihan-pelatihan bisa dilakukan di satu tempat," jelasnya.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poswadi menyampaikan usulan dan keluhan dari penyandang disabilitas akan ditampung. Termasuk usulan rumah layanan disabilitas tengah disiapkan. Keberadaannya nantinya diharapkan melayani seluruh penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. "Rumah layanan disabilitas kami tampung usulannya, karena beberapa kecamatan sudah mengincar mengusulkan lokasinya," tambah Heroe.

Pihaknya menegaskan Pemkot Yogyakarta dalam membuat kebijakan mengampu pada lima kelompok afirmasi, termasuk penyandang disabilitas. Misalnya dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2019 juga memberikan kuota bagi penyandang disabilitas. Dalam pembangunan gedung baru juga telah memberikan fasilitas yang dapat diakses para penyandang disabilitas. "Tapi memang untuk gedung-gedung lama masih jadi PR dan akan kami perbaiki. Gedung-gedung privat seperti mal kami juga arahkan agar ramah bagi penyandang disabilitas," ucapnya.

Selain itu pihaknya melalui Pokja Inklusi di Apeksi sedang membuat peta untuk mengukur kedalaman kebijakan inklusi yang dimiliki setiap kota di Indonesia. Tujuannya untuk mendapatkan modal percontohan kota inklusi. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 06 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005